

PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI MALUKU UTARA

2014



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA

No Katalog: 3205005.82

**PROFIL KEMISKINAN
PROVINSI MALUKU UTARA
2014**

<http://malut.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

PROFIL KEMISKINAN

PROVINSI MALUKU UTARA 2014

Katalog BPS	: 3205005.82
No. Publikasi	: 82520.1510
Ukuran Buku	: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman	: iv + 48 halaman
Naskah	: Bidang Statistik Sosial
Desain Sampul	: Bidang Statistik Sosial
Diterbitkan Oleh	: BPS Provinsi Maluku Utara
Tahun	: 2015

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran.

Publikasi “Profil Kemiskinan Provinsi Maluku Utara” menyajikan data dan informasi kemiskinan yang mencakup metodologi penghitungan tingkat kemiskinan yang digunakan oleh BPS. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan analisis perkembangan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan, distribusi dan ketimpangan pengeluaran di Maluku Utara. Data kemiskinan yang disajikan dalam publikasi ini adalah hasil pengolahan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Diharapkan publikasi ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian publikasi ini, diucapkan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang tulus. Saran dan kritik dari berbagai pihak terutama dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Ternate, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



M. Habibullah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Bab 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Data Yang Digunakan	4
Bab 2 Kajian Literatur	
2.1 Definisi Kemiskinan.....	7
2.2 Pendekatan Penghitungan Kemiskinan	11
Bab 3 Metodologi	
3.1 Penghitungan Kemiskinan.....	19
3.2 Indikator Kemiskinan.....	24
3.3 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan.....	25
Bab 4 Ulasan Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara	
4.1. Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara....	33
4.2. Jumlah Penduduk Miskin.....	34
4.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan.....	35
4.4. Indeks Keparahan Kemiskinan.....	37
4.5. Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran...	38

DAFTAR TABEL

Tabel L.1.	Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014	43
Tabel L.2.	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014	44
Tabel L.3.	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014.....	45
Tabel L.4.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014.....	46
Tabel L.5.	Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014.....	47
Tabel L.6.	Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria World Bank Tahun 2014	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz.....	26
Gambar 4.1.	Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014	33
Gambar 4.2.	Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014	35
Gambar 4.3.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014	36
Gambar 4.4.	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014	37
Gambar 4.5.	Perkembangan Koefisien Gini Maluku Utara, Tahun 2010 - 2014.....	39
Gambar 4.6.	Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara Tahun 2014	40

BAB 1

PENDAHULUAN

<http://jualahmpus.go.id>

1.1 Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di daerah manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat waktu. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) sudah melakukan penghitungan jumlah penduduk miskin secara periodik setiap tiga tahun sejak tahun 1984, dan penyajiannya sampai level provinsi baru dimulai tahun 1990. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun sampai level provinsi. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret. Selanjutnya mulai tahun 2011 dengan dilaksanakannya Susenas secara triwulanan (Maret, Juni, September, dan Desember), BPS mulai menyajikan data kemiskinan untuk level kabupaten/kota meskipun untuk karakteristik rumah tangga miskin hanya dapat disajikan pada tingkat provinsi.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis mencakup tingkat kemiskinan pada Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014. Analisis ini juga menyajikan distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk.

1.3 Data yang Digunakan

Sumber data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor pada tahun 2014.

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

<http://mdulit.ums.go.id>

2.1 Definisi Kemiskinan

2.1.1 Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu daerah pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”.

Tatkala negara atau daerah menjadi lebih kaya (sejahtera), negara atau daerah tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika median/rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat.

Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan daerah secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat

dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar daerah dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

2.1.2 Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum ini diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup. Garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin terbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah.

Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu daerah dengan daerah lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua

daerah tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan ke mana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan.

Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu: a) US \$ 1 per kapita per hari, di mana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup di bawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 per kapita per hari, di mana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US \$ yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

2.1.3 Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosebroto dalam “Kemiskinan Struktural: Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan, tetapi (lebih lanjut dari itu) juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat.

Di dalam kondisi struktur yang demikian itu, kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang dan/atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Misalnya penduduk Maluku Utara yang tinggal di pulau-pulau terluar atau mendekati pulau terluar.

Adapun kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogianya bisa dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya yang dialami oleh orang-orang Suku Laut.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan, “Kemiskinan adalah suatu ketidakberdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi

kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang teraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Acapkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.2 Pendekatan Penghitungan Kemiskinan

2.2.1 Pendekatan Pendapatan/Pengeluaran

Strategi kebutuhan dasar (basic needs), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), dipromosikan dan dipopulerkan oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 dengan judul “Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Masalah bagi Satu Dunia”. Strategi kebutuhan dasar

memang memberi tekanan pada pendekatan langsung dan bukan cara tidak langsung seperti melalui efek menetes ke bawah (*trickle-down effect*) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kesulitan umum dalam penentuan indikator kebutuhan dasar adalah standar atau kriteria yang subjektif karena dipengaruhi oleh adat, budaya, daerah, dan kelompok sosial. Di samping itu, kesulitan penentuan secara kuantitatif dari masing-masing komponen kebutuhan dasar karena dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh komponen itu sendiri, misalnya selera konsumen terhadap suatu jenis makanan atau komoditi lainnya.

Beberapa kelompok atau ahli telah mencoba merumuskan mengenai konsep kebutuhan dasar ini termasuk alat ukurnya. Konsep kebutuhan dasar yang dicakup adalah komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan.

Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut United Nations (1961), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
2. Menurut UNSRID (1966), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi,

perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.

3. Menurut Ganguli dan Gupta (1976), sebagaimana dikutip oleh Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.
4. Menurut Green (1978), sebagaimana dikutip oleh Thee Kian Wie (1981), komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) personal consumption items yang mencakup pangan, sandang, dan pemukiman; (ii) basic public services yang mencakup fasilitas kesehatan, pendidikan, saluran air minum, pengangkutan, dan kebudayaan.
5. Menurut Hendra Esmara (1986), komponen kebutuhan dasar primer untuk bangsa Indonesia mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan.
6. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), komponen kebutuhan dasar terdiri dari pangan dan bukan pangan yang disusun menurut daerah perkotaan dan perdesaan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Indikator kebutuhan minimum untuk masing-masing komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pangan, dinyatakan dengan kebutuhan gizi minimum yaitu perkiraan kalori dan protein.

- b. Sandang, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan pakaian, alas kaki, dan tutup kepala.
- c. Perumahan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk sewa rumah, listrik, minyak tanah, kayu bakar, arang, dan air.
- d. Pendidikan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk keperluan biaya sekolah (uang sekolah, iuran sekolah, alat tulis, dan buku).
- e. Kesehatan, dinyatakan dengan indikator pengeluaran rata-rata untuk penyediaan obat-obatan di rumah, ongkos dokter, perawatan, termasuk obat-obatan.

2.2.2 Pendekatan Rata-rata Per Kapita

Pendekatan rata-rata per kapita yang diterapkan dalam penghitungan kemiskinan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Biasanya pendekatan rata-rata per kapita ini belum mempertimbangkan tingkat konsumsi menurut golongan umur dan jenis kelamin serta skala ekonomi dalam konsumsi. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan sebesar 1 dolar dalam bentuk satuan PPP per kapita per hari, sedangkan negara maju seperti Eropa Barat menetapkan $1/3$ dari nilai PDB per kapita per tahun sebagai garis kemiskinan. Untuk kasus Indonesia, garis kemiskinan didekati

dengan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari ditambah pengeluaran minimum bukan makanan (perumahan dan fasilitasnya, sandang, kesehatan, pendidikan, transpor, dan barang-barang lainnya).

<http://malut.bps.go.id>

BAB 3

METODOLOGI

<http://mat.pw.go.id>

3.1 Penghitungan Kemiskinan

3.1.1 Konsep

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan selama tahun 2014.

3.1.3 Metode

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sehingga: $GK = GKM + GKNM$.

Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan

dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, dan lemak, dll).

Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

3.1.4 Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

di mana:

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2.100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya, GKM_j tersebut disetarakan dengan 2.100 kilokalori dengan mengalikan 2.100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$HK_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} Q_{jkp}}$$

di mana:

K_{jkp} = kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

HK_{jp} = harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = HK_{jp} \times 2.100$$

di mana:

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2.100 kilokalori/kapita/hari atau Garis Kemiskinan Makanan (GKM)

j = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

di mana:

$GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.

V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).

r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.

J = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu kabupaten/kota dihitung dengan:

$$\%PM_k = \frac{PM_k}{P_k}$$

di mana:

$\%PM_k$ = % Penduduk miskin di kabupaten/kota k.

PM_k = Jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota k.

P_k = Jumlah penduduk di kabupaten/kota k.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level provinsi merupakan jumlah dari penduduk miskin kabupaten/kota atau

$$PM_p = \sum_{k=1}^n PM_k$$

di mana:

PM_p = Penduduk miskin provinsi.

PM_k = Penduduk miskin kabupaten/kota k.

n = Jumlah kabupaten/kota.

Persentase penduduk miskin provinsi adalah

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p}$$

di mana :

$\%PM_p$ = Persentase penduduk miskin provinsi.

PM_p = Jumlah penduduk miskin provinsi.

P_p = Jumlah penduduk provinsi.

3.2 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. Head Count Index (HCI = P_0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* = P_1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* = P_2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

di mana:

$$\alpha = 0, 1, 2$$

Jika $\alpha=0$, diperoleh *Head Count Index* (P_0),

jika $\alpha=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan

(*Poverty Gap Index* = P_1),

jika $\alpha=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index = P₂*).

- z = Garis kemiskinan
- y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dari penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, \dots, q$), $y_i < z$
- q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- n = Jumlah penduduk

3.3 Distribusi dan Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini, akan digunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

3.3.1 Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan

pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1})$$

di mana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

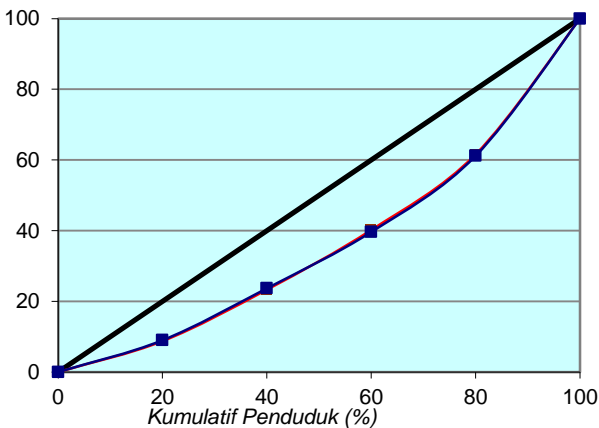
fp_i = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_i = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fc_{i-1} = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-(i-1)

Gambar 3.1
Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Kumulatif Pengeluaran (%)



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun, pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan, kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya sebagai berikut:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (mean independence). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (population size independence). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, kondisi lain tetap (ceteris paribus). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- Dapat didekomposisi

Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok, yakni nilai total koefisien Gini dari suatu

masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (sub-group).

- Dapat diuji secara statistik

Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik bootstrap interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

3.3.2 Ukuran Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah, 40 persen penduduk dengan pendapatan menengah, dan 20 persen penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40 persen terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.

- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

<http://malut.bps.go.id>

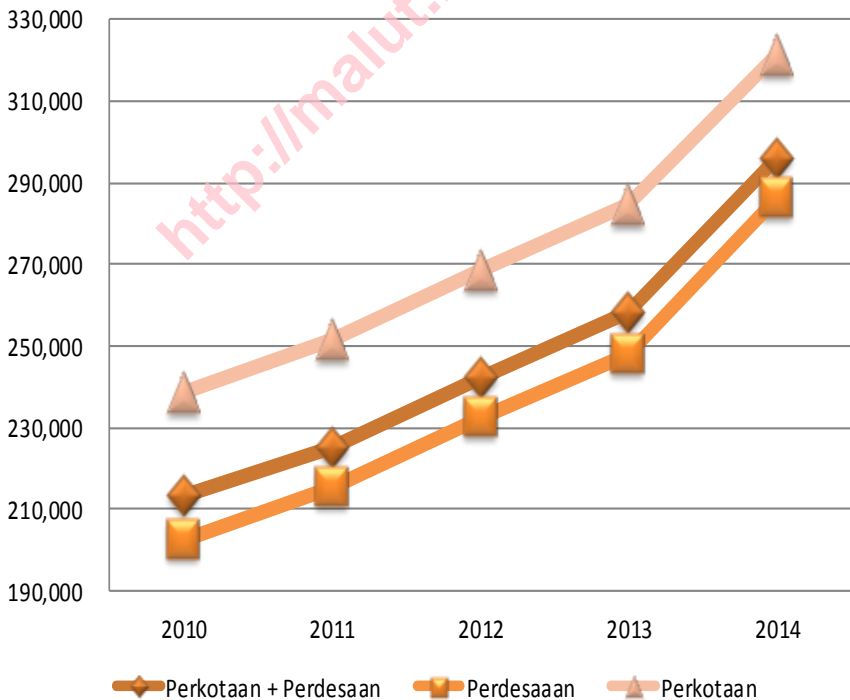
BAB 4

**ULASAN TINGKAT
KEMISKINAN PROVINSI
MALUKU UTARA**

4.1 Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Selama lima tahun terakhir, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, tersaji pada Gambar 4.1. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan.

Gambar 4.1
Perkembangan Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014



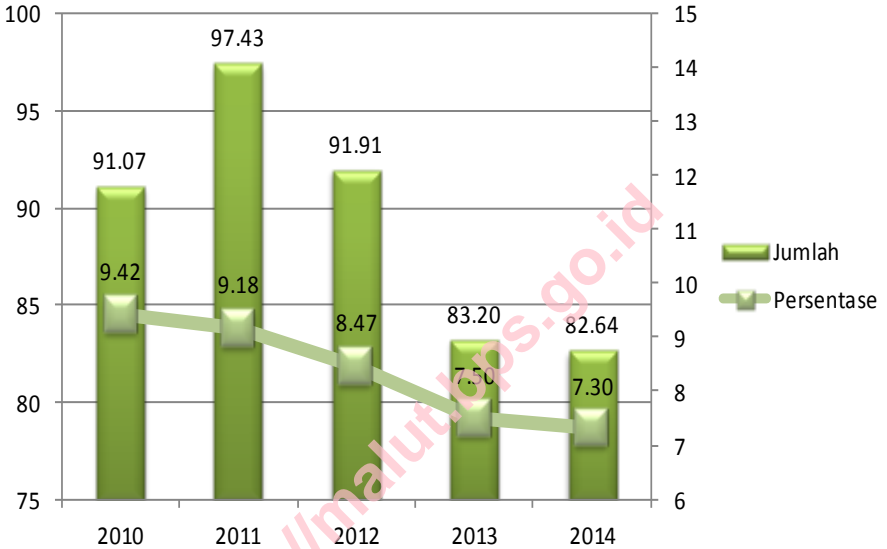
Garis kemiskinan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2014 sebesar Rp295.787,- naik sebesar 14,61 persen dari tahun 2012. Pada daerah perkotaan tahun 2014 sebesar Rp.321.231,- naik sebesar 12,96 persen dari tahun 2013. Sedangkan pada daerah perdesaan, garis kemiskinan tahun 2014 sebesar Rp.286.242,- naik sebesar 15,40 persen dari tahun 2013. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.1.

Garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih rendah daripada daerah perkotaan karena komoditi untuk penghitungan garis kemiskinan di daerah perdesaan lebih sedikit daripada daerah perkotaan. Selain itu, harga komoditi makanan di daerah perdesaan pada umumnya lebih murah dibandingkan di daerah perkotaan.

4.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Perkembangan penduduk miskin Maluku Utara dalam lima tahun terakhir relatif menunjukkan penurunan, baik dari jumlah maupun persentase. Pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin sekitar 91 ribu orang atau sebesar 9,42 persen penduduk Maluku Utara. Mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 meskipun secara persentase turun. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, baik pada jumlah maupun persentase penduduk miskin. Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin sekitar 82,6 ribu orang atau sebesar 7,30 persen penduduk Maluku Utara. Selengkapnya tersaji dalam Tabel L.2 dan L.3.

Gambar 4.2
Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014



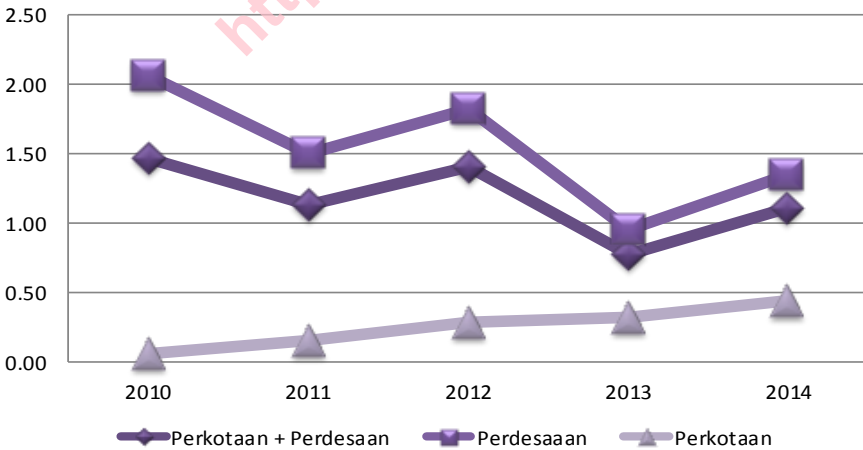
4.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Secara umum indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari waktu ke waktu, yaitu dari 1,471 pada tahun 2010 menjadi 1,102 pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di Maluku Utara semakin

mendekati garis kemiskinan sehingga semakin besar peluang untuk mengentaskannya dari kemiskinan. Pada daerah perkotaan, meskipun mengalami sedikit kenaikan indeks kedalaman kemiskinan, namun masih jauh dibawah indeks kedalaman kemiskinan pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa lebih mudah untuk mengentaskan kemiskinan pada daerah perkotaan, meskipun ada kecenderungan bahwa penduduk miskin di daerah perkotaan dari tahun ke tahun semakin sulit untuk dikeluarkan dari garis kemiskinan. Hal ini terlihat dari perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Selengkapnya pada Tabel L.4.

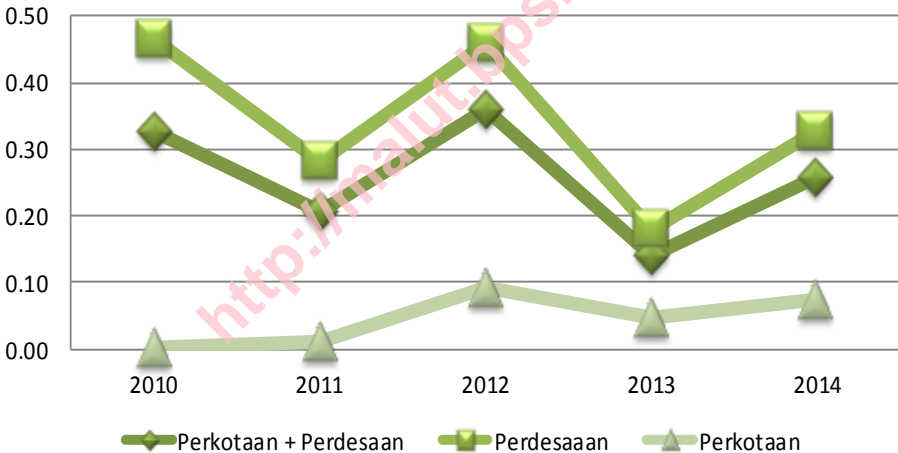
Gambar 4.3
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014



4.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Gambar 4.4
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan
Provinsi Maluku Utara, Tahun 2010-2014



Dalam lima tahun terakhir, secara umum indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Maluku Utara, yaitu dari 0,327 pada tahun 2010 menjadi 0,257 pada tahun 2014, seperti terlihat dalam Gambar 4.4. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin Maluku Utara semakin berkurang. Pada daerah perkotaan, meskipun mengalami sedikit kenaikan indeks

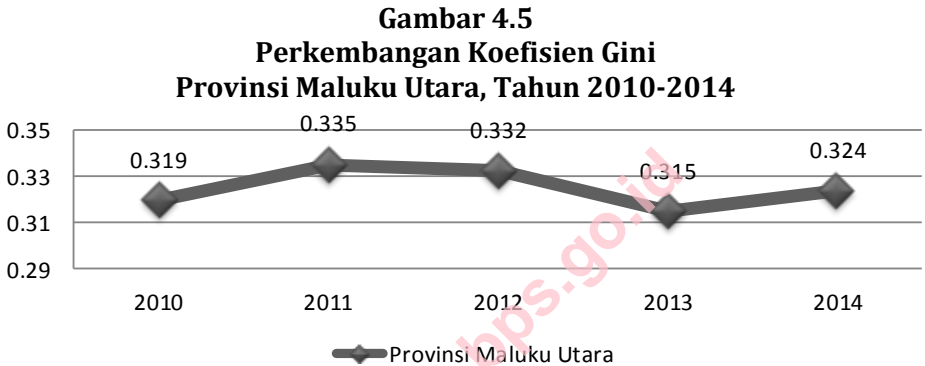
keparahan kemiskinan, namun masih jauh dibawah indeks keparahan kemiskinan pada daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengeluaran penduduk miskin pada daerah perkotaan cenderung lebih seragam dibandingkan daerah perdesaan yang lebih timpang, meskipun ada kecenderungan bahwa penduduk miskin di daerah perkotaan dari tahun ke tahun semakin mengalami ketimpangan pengeluaran di antara mereka.

4.5 Distribusi dan Ketimpangan Pengeluaran

Untuk melihat distribusi pengeluaran penduduk sekaligus melihat bagaimana pemerataannya, salah satu ukuran atau indikator yang dapat digunakan adalah Gini Rasio. Dengan dihasilkannya angka Gini Rasio, akan terdeteksi bagaimana tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah. Nilai Gini Rasio selalu bekisar antara 0 dan 1. Jika nilai Gini Rasio di bawah 0,3, dapat dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah tersebut rendah. Pada interval 0,3-0,5 dalam skala nilai Gini Rasio, ketimpangan pengeluaran penduduk di suatu daerah adalah sedang, sedangkan dikatakan ketimpangannya tinggi jika nilainya di atas 0,5.

Pada tahun 2014, nilai Gini Rasio Provinsi Maluku Utara sebesar 0,324, yang berarti ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara adalah sedang. Begitu juga dalam rentang lima tahun terakhir (2010-2014), Maluku Utara termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Meskipun demikian, terlihat bahwa

ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara cenderung fluktuatif, seperti tersaji dalam Gambar 4.5.

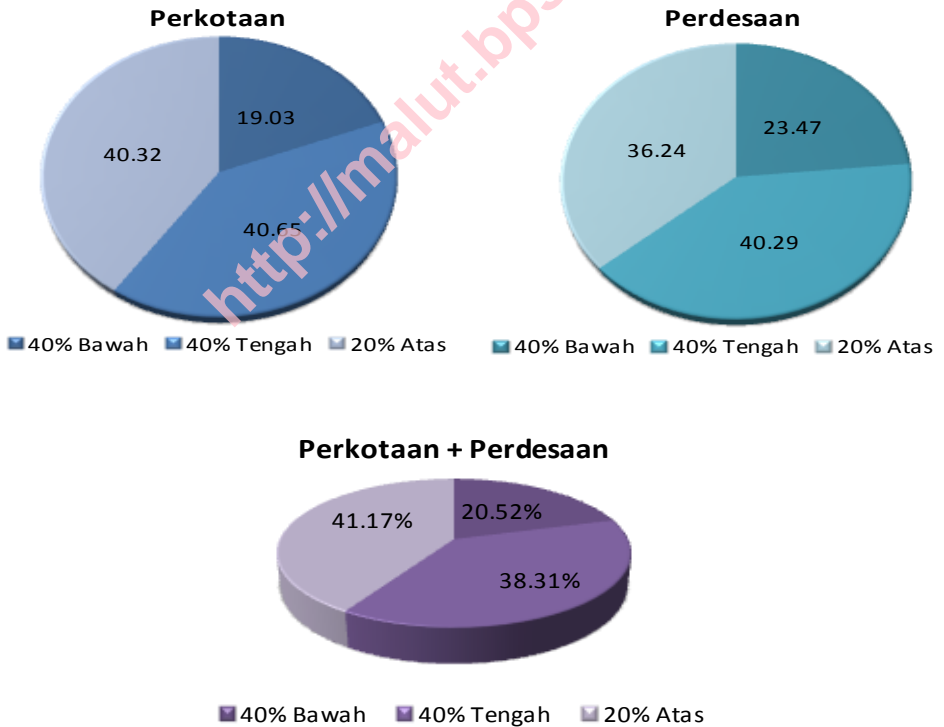


Indikator lain untuk melihat distribusi pendapatan antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia (*World Bank*). Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar, yaitu 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas. Gambar 4.6. berikut ini menyajikan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Berdasarkan Kriteria Bank Dunia tersebut, menunjukkan indikasi bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk Maluku Utara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masih tergolong rendah karena proporsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah masih di atas 17 persen.

Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa distribusi pengeluaran paling besar berada pada 20 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Hal ini sangat wajar mengingat merekalah

yang paling memiliki potensi untuk melakukan konsumsi. Namun demikian, apabila pada kelompok penduduk 20 persen teratas ini terlalu mendominasi, maka yang terjadi adalah distribusi pengeluaran pada kelompok di bawahnya akan lebih kecil sehingga akan terjadi ketimpangan pengeluaran.

Gambar 4.6
Distribusi Pengeluaran Penduduk Maluku Utara
Tahun 2014



LAMPIRAN

TABEL - TABEL

**Tabel L.1. Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014**

(dalam ribuan rupiah)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
2010	238,5	202,1	212,9
2011	251,4	215,4	225,2
2012	268,7	232,1	242,1
2013	284,3	248,0	258,1
2014	321,2	286,2	295,8

**Tabel L.2. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014**

(dalam ribuan)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
2010	7,64	83,44	91,07
2011	8,10	89,33	97,43
2012	7,57	84,35	91,91
2013	9,16	74,04	83,20
2014	12,19	70,45	82,64

**Tabel L.3. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014**

(dalam persen)

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaan
2010	2,66	12,28	9,42
2011	2,80	11,58	9,18
2012	2,55	10,69	8,47
2013	2,99	9,22	7,50
2014	3,95	8,56	7,30

**Tabel L.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
2010	0,059	2,067	1,471
2011	0,149	1,496	1,128
2012	0,279	1,823	1,402
2013	0,314	0,951	0,775
2014	0,439	1,351	1,102

**Tabel L.5. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara
Menurut Daerah, Tahun 2010 – 2014**

Tahun	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
2010	0,002	0,464	0,327
2011	0,010	0,230	0,206
2012	0,090	0,459	0,359
2013	0,046	0,178	0,141
2014	0,073	0,327	0,257

**Tabel L.6. Distribusi Pengeluaran Menurut Kriteria *World Bank*
Provinsi Maluku Utara Tahun 2014**

(dalam persen)

Kelompok Pendapatan	Kategori		
	Perkotaan	Perdesaaan	Perkotaan + Perdesaaan
40% Bawah	19,03	23,47	20,52
40% Tengah	40,65	40,29	38,31
20% Atas	40,32	36,24	41,17

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://malut.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Jl. Stadion No. 65, Ternate

Telp : (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: malut@bps.go.id